

## **MATA KULIAH SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT**

### **BAB I.**

#### **PENGANTAR SOSIOLOGI KEHUTANAN DAN KEHUTANAN MASYARAKAT**

**Oleh Markum**

##### **1.1. Pengantar**

Sosiologi berasal dari kata latin “*socius*” berarti teman atau sesama dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan (Sudarsono *et al*, 2026). Istilah sosiologi pertama kali ditemukan oleh ahli filsafat berkebangsaan Prancis yaitu Auguste Comte pada tahun 1838 (Goodman, 2013). Sosiologi merupakan ilmu fisika sosial yang dikembangkan (Pickering, 2000 dalam Goodman, 2013), sebagai alat pendekatan sosial atau alat untuk mempelajari masyarakat (Sudarsono *et al*, 2016).

Awal mula muncul kajian sosiologi karena masyarakat menghadapi berbagai masalah dan ancaman dalam kehidupan (Salamah, 2011). Sosiologi diartikan sebagai suatu ilmu yang relatif masih baru, walaupun perkembangan tentang sosiologi telah cukup lama. Sosiologi merupakan ilmu yang berkenaan dengan kehidupan masyarakat. Menurut Sudarsono *et al* (2016) sosiologi merupakan ilmu yang muncul jauh setelah kehadiran ilmu alam dan ilmu sosial lainnya.

Ilmu sosiologi menurut Soekanto, (2000) merupakan ilmu sosial yang objeknya adalah masyarakat. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri karena telah memenuhi unsur-unsur ilmu pengetahuan diantaranya: Sosiologi bersifat empiris, teroris, kumulatif, dan sosiologi bersifat Non-etnis.

Sosiologi pada hakikatnya semata-mata bukan ilmu murni (pure science) yang mengembangkan ilmu pengetahuan secara abstrak, namun sosiologi bisa juga menjadi ilmu terapan (applied science) yaitu menyajikan cara untuk mempergunakan pengetahuan ilmiah guna untuk memecahkan masalah praktis atau masalah sosial yang perlu di tanggulangi (Horton dan Hunt, 1987:41 dalam anonim, 2009).

Dalam ilmu sosiologi terdapat paradigma sosiologi yang membantu merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan yang mesti dijawab, bagaimana mestinya menjawab, serta aturan-aturan yang harus diikuti dalam menjawab persoalan tersebut (Hanum, 2011).

Pada Bab I buku ajar ini menyajikan tentang pemahaman mengenai sosiologi kehutanan dan kehutanan masyarakat, dalam hubungannya dengan tata kelola hutan. Oleh

karena itu, pembahasan sosiologi akan tipikal membahas mengenai norma, fenomena, sistem nilai dan interaksi sosial pada masyarakat di sekitar kawasan hutan, dan hubungan-hubungannya dengan pengelolaan sumber daya hutan.

## 1.2. Tujuan Pembelajaran

- a. Mahasiswa memahami tentang pengertian dan ruang lingkup sosiologi kehutanan
- b. Mahasiswa dapat membedakan pengertian sosiologi kehutanan dan kehutanan masyarakat
- c. Mahasiswa dapat mendeskripsikan tentang pelaku sosial, struktur sosial, sistem sosial dan perubahan sosial dalam lingkup sosiologi kehutanan

## 1.3. Pengertian Sosiologi

Definisi-definisi tentang sosiologi menurut para ahli yang terangkum dalam buku ajar pengantar sosiologi oleh Sudarsono (2000) mengartikan sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fakta sosial, struktur sosial, tindakan sosial, dan hubungan-hubungan atau gejala-gejala pada masyarakat yang terjadi berulang-ulang.

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan masyarakat dilihat dari struktur sosial, interaksi sosial, serta perubahan sosial dalam masyarakat (Gulo *et al*, 2014). Sedangkan menurut kamus Bahasa Indonesia sosiologi adalah sebagai ilmu pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat atau ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya (Menurut Kamus Bahasa Indonesia).

Sosiologi merupakan ilmu yang sama ilmiahnya seperti ilmu eksakta, dimana ilmu sosiologi dibagi menjadi 2 yaitu: **Social Statics** dan **Social Dynamics**. Sosiologi Statis (**Statis Sosial**) berbicara mengenai struktur sosial, institusi sosial dan hubungannya satu dengan yang lain, sedangkan Dinamika Sosiologis (**Dinamika Sosial**) berbicara mengenai Perubahan Sosial (Simanjuntak, 2016).

Lars Udehn, 1981 dalam Ritzer dan Goodman, (2013) mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang memusatkan perhatiannya pada pemahaman interpretif atas tindakan sosial dan pada penjelasan kausal atas proses dan konsekuensi tindakan tersebut, karena sosiologi haruslah berupa sebuah ilmu, harus memusatkan perhatian pada kualitas, dan sosiologi harus menggunakan pemahaman interpretif.

Sedangkan menurut Harjono (2012), sosiologi mempelajari tentang tiga pokok permasalahan yaitu: individu, masyarakat, dan hubungan antar keduanya, dimana didalam aliran teori sosiologi dapat dikelompokkan dari ketiga pokok permasalahan tersebut.

Dari beberapa penjelasan definisi terkait dengan sosiologi di atas, dapat kita sederhanakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan sosial, kelompok sosial, atau tentang sesuatu yang terjadi pada sistem sosial dan gejala-gejala sosial pada masyarakat karena sosiologi adalah ilmu tentang masyarakat dan kehidupan sosial.

Menurut Syahrial Syarbani dan Rusdiyanto dalam Septiawan (2015) ruang lingkup sosiologi adalah

- Perilaku manusia dilihat dalam kaitannya dengan struktur-struktur masyarakat dan kebudayaan yang dimiliki dan ditunjang bersama. Karena sosiologi mempelajari tentang perilaku manusia dengan kelompok yang dibangunnya seperti keluarga, komunitas, suku bangsa, pemerintahan dan berbagai kelompok sosial, agama, politik dan sebagainya. Ruang lingkup sosiologi sangat luas meliputi masyarakat, kelompok-kelompok sosial, komunitas, keluarga dan sebagainya.
- Ruang lingkup masyarakat, karena sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sosial yang obyeknya adalah masyarakat.
- Ruang lingkup struktur sosial, dimana menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi dalam Septiawan (2015) sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial.

#### **1.4. Pengertian sosiologi kehutanan**

Istilah sosiologi kehutanan terbentuk karena terjadi perubahan yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan yang lain, Konsekuensinya adalah sosiologi juga mengalami perubahan-perubahan yang cenderung bertambah. Hal ini mengacu kepada timbulnya berbagai istilah baru dalam sosiologi yaitu, sosiologi pedesaan, sosiologi perkotaan, sosiologi pertanian, dan istilah tersebut sepadan dengan sosiologi kehutanan (Rahardji, 1999 dalam Rizal 2012).

Sosiologi dan kehutanan mempunyai kaitan yang sangat erat, yaitu adanya hubungan masyarakat dengan lingkungan sekitar tempat terjadinya interaksi. Interaksi

yang dimaksud adalah interaksi masyarakat dengan hutan yang melahirkan berbagai bentuk relasi baik positif maupun negatif.

Sosiologi Kehutanan adalah ilmu sosial yang mengambil obyeknya secara geografis ada di sekitar kawasan hutan, dan mempelajari beragam interaksi antara komunitas dengan komunitas lainnya, dan komunitas dengan sumber daya alam dimana mereka menggantungkan kehidupannya.

Ruang lingkup sosiologi kehutanan mempunyai karakteristiknya sendiri dibandingkan dari ilmu sosial lainnya. Hal ini dikarenakan ruang lingkup sosiologi mencakup semua interaksi sosial yang berlangsung antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok di lingkungan masyarakat khususnya di sekitar kawasan hutan.

Sebagaimana dengan sosiologi secara umum, maka sosiologi kehutanan juga mempelajari tentang struktur sosial, proses sosial dan perubahan sosial. Persoalan sosial di sektor kehutanan cenderung lebih kompleks, karena ada proses interaksi antara domain negara dengan domain masyarakat dalam pengelolaan sebuah kawasan. Di lihat dari status lahan, hutan selalu dikuasai oleh negara, namun dalam pengelolaan diserahkan kepada masyarakat. Ada semacam pengintegrasian antara kewenangan negara di satu sisi dengan kebutuhan dan tindakan-tindakan privat oleh masyarakat.

Kedua sisi tersebut, kemudian diakomodir dalam sebuah skema kebijakan pengelolaan hutan oleh masyarakat yang disebut dengan kehutanan masyarakat, atau hutan kemasyarakatan ataupun perhutanan sosial.

### **1.5. Pengertian Kehutanan Masyarakat**

Kehutanan masyarakat adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan akses pengelolaan hutan oleh masyarakat dengan tujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan melestarikan hutan. Dengan demikian kehutanan masyarakat adalah sebuah skema atau program pengelolaan hutan oleh masyarakat yang dipayungi oleh kebijakan pemerintah. Payung kebijakan dimaksud adalah berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah (Perda).

Kehutanan Masyarakat juga sering disebut dengan istilah pengelolaan hutan berbasis masyarakat (PHBM), yang prinsipnya memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk

andil dalam pengelolaan hutan. PHBM ini mencuat pada awal reformasi kehutanan (1998), karena ada tuntutan kuat agar sistem pengelolaan hutan yang selama masa orde baru bersifat sentralistik, dimana masyarakat hanyalah sebagai pekerja pada proyek-proyek kehutanan, diubah menjadi lebih desentralistik, dengan mengedepankan peran dan kebutuhan masyarakat, khususnya di sekitar kawasan hutan. Pembahasan lebih mendalam tentang PHBM dan Perhutanan Sosial akan dibahas pada bab tersendiri.

## **1.6. Pelaku Sosial, Struktur sosial dan Strata Sosial**

### **1.6.1. Pelaku sosial**

Pelaku sosial adalah seseorang yang menjalankan aktifitas-aktifitas sosial. Pada konsep habitus/tindakan menurut Bourdieu, (1984) dalam Pamungkas, (2017) habitus/tindakan memiliki dua dimensi yaitu struktur subjektif dan struktur objektif yang diinternalisasikan. Kedua dimensi tersebut untuk menentukan persepsi, perilaku, dan praktik-praktik seorang pelaku sosial.

Para pelaku sosial begitu beragam atau bervariasi, yakni mulai dari diri sendiri, keluarga, lingkungan kerja, sekolah, hingga komunitas lainnya. Pelaku sosial secara pribadi dan keluarga, disebut dengan sosial primer. Sementara itu, sosial di luar keluarga dan pribadi atau di dalam konteks lingkungan sekitar, dinamakan dengan sosialisasi sekunder (Faruq, 2016).

### **1.6.2. Struktur Sosial**

Struktur sosial berasal dari kata *structum* yang berarti menyusun atau membangun (Waluya, 2009). Secara harfiah, struktur diartikan sebagai susunan atau bentuk. Menurut ilmu sosiologi struktur sosial adalah tatanan atau susunan sosial yang membentuk kelompok-kelompok sosial dalam masyarakat (Atmaja *et al*, 2011). Struktur sosial menurut (Hani'ah, 2016) adalah jalinan unsur-unsur pokok sosial seperti kaidah-kaidah dan norma-norma sosial, lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial serta lapisan-lapisan sosial.

Definisi Struktur sosial menurut Radcliffe-Brown dan Evans-Pritchard dalam Waluya, (2009) adalah suatu rangkaian komplek dari relasi sosial yang berwujud dalam suatu masyarakat atau relas-relasi yang tetap dan menyatukan kelompok-kelompok sosial pada satuan yang lebih luas. Sedangkan pengertian struktur sosial menurut Selo

Soemardjan dan Soelaman Soemardi dalam Anonim (2009) adalah keseluruhan dari jalinan antara struktur-struktur sosial pokok yaitu kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga sosial, kelompok sosial, serta lapisan sosial.

Struktur sosial merupakan hubungan antar unsur-unsur sosial, dimana unsur-unsur sosial yang dimaksud antara lain lembaga sosial, organisasi sosial, lapisan sosial, serta nilai dan norma sosial. Hubungan tersebut memiliki pengaruh untuk menentukan pilihan serta membuat keputusan yang akan berdampak dalam hubungan sosial disuatu lingkungan masyarakat. Dalam pengertian yang lain, struktur sosial merupakan kerangka sosial yang dapat menggambarkan berbagai unsur dalam masyarakat.

Struktur sosial merupakan perwujudan pergaulan hidup manusia yang mencakup berbagai kelompok, terdiri dari banyak orang dan turut meliputi setiap individu dalam lingkungan masyarakat tersebut. Atau dengan kata lain, struktur sosial adalah kerangka sosial yang terbentuk dari hubungan antar unsur masyarakat yang dapat menentukan pilihan dan membuat keputusan untuk kepentingan bersama dalam suatu lingkungan sosial.

Dari beberapa definisi di atas struktur sosial merupakan relasi-relasi sosial yang penting dalam menentukan tingkah laku/kehidupan manusia, fenomena kehidupan dalam struktur sosial di klasifikasikan sebagai berikut: struktur kaku dan luwes, struktur formal dan informal, struktur homogen dan heterogen, struktur mekanik dan statistik, dan struktur atas dan bawah (Waluyo, 2009). Berikut adalah beberapa gambar struktur sosial dalam kehidupan sehari-hari :

Ciri-ciri Struktur sosial di bagi menjadi dua (Atmaja *et al*, 2011) yaitu: pertama muncul pada kelompok masyarakat, yaitu struktur yang muncul pada individu-individu yang memiliki peran karena pada setiap sistem sosial terdapat macam-macam peran dan status masyarakat, dan kedua erat dengan kebudayaan, yaitu suatu kelompok yang lama kelamaan akan membentuk suatu kebudayaan.

### **1.6.3. Strata Sosial**

#### **a. Pengertian**

Strata sosial atau stratifikasi sosial berasal dari kata *Social Stratification* yang berarti Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat; kata *Stratification* berasal dari *stratum* (jamaknya:strata) yang berarti lapisan, maka stratifikasi sosial adalah perbedaan

masyarakat atau penduduk sekitar dalam berbagai kelas-kelas secara bertingkat (Moeis, 2008). Menurut Maunah (2015) menjelaskan bahwa stratifikasi sosial adalah sistem pembeda individu atau kelompok masyarakat, yang menempatkan pada kelas-kelas sosial yang berbeda.

Stratifikasi sosial merupakan suatu konsep dalam ilmu sosiologi yang melihat bagaimana anggota masyarakat dibedakan berdasarkan status yang dimilikinya (Wardana, 2013). Stratifikasi sosial dapat juga diartikan sebagai perbedaan anggota masyarakat, berdasarkan status yang diperoleh dan status yang diraih (anonim, 2009).

Sedangkan menurut Max Weber dan Robert M.Z Lawang dalam Junaidi *et al* (2015) sama-sama mengartikan bahwa stratifikasi sosial adalah sebagai penggolongan orang-orang dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan hirarkis menurut dimensi kekuasaan privilese dan prestise.

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan perbedaan dan pengelompokan kelompok sosial secara bertingkat, misalnya dalam kelompok tersebut ada strata tinggi, sedang dan strata rendah. Dimana penilaian tersebut didasarkan dengan adanya simbol-simbol (kekayaan, pendidikan, jabatan dan agama) dan nilai yang dianggap berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, budaya maupun suatu kelompok sosial (Singgih, 2007).

Kriteria stratifikasi sosial terdapat berbagai macam lapisan yang menjadi dasar dalam menentukan kriteria. Kriteria yang dipakai dalam menggolongkan masyarakat ke dalam lapisan (waluya, 2009) yaitu: ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, ukuran kehormatan, ukuran ilmu pengetahuan

Stratifikasi sosial pada hakikatnya berbeda dengan konsep ketidaksamaan sosial (social inequality) (sanderson, 1993:145-146 dalam Anonim 2009). Inti dari stratifikasi adalah perbedaan akses golongan satu dengan golongan masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya. Secara rinci ada tiga aspek karakteristik stratifikasi sosial yaitu: perbedaan dalam kemampuan atau kesanggupan, perbedaan dalam gaya hidup (life style), perbedaan dalam hak dan akses dalam memanfaatkan sumber daya.

## **b. Proses Terbentuknya Stratifikasi Sosial**

Proses terbentuknya stratifikasi sosial masyarakat terjadi dengan dua cara yaitu stratifikasi sosial terbentuk dengan sendirinya yang bersamaan dengan proses perkembangan sosial masyarakat, dan kedua terbentuk secara sengaja yang ditentukan oleh masyarakat sendiri (Sudarsono *et al*, 2016).

**Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya**, proses tersebut merupakan proses yang sesuai dengan dinamika perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Berikut adalah ukuran yang digunakan pada stratifikasi sosial yang terjadi dengan sendirinya: kepandaian seseorang atau yang memiliki ilmu pengetahuan, tingkat umur (aspek senioritas), sifat keaslian, harta, keturunan, adanya pertentangan dalam masyarakat.

**Stratifikasi sosial yang terjadi dengan sengaja**, proses tersebut pada umumnya sengaja disusun untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang sering terjadi berupa alasan yang berkaitan dengan kekuasaan atau wewenang dalam satu organisasi formal. Berikut adalah urutan cara menentukan proses terbentuknya stratifikasi sosial dengan sengaja untuk menetapkan kedudukan seseorang dalam strata tertentu, yaitu:

- Upacara peresmian (pengangkatan)
- Pemberian lambang atau tanda-tanda kehormatan
- Pemberian nama-nama jabatan atau pangkat
- Sistem upah/gaji berdasarkan golongan
- Wewenang dan kekuasaan yang disertai dengan pembatas dalam pelaksanaan.

## **c. Fungsi Stratifikasi Sosial**

Fungsi stratifikasi sosial bagi masyarakat untuk menyusun alat bagi masyarakat dalam mencapai beberapa tugas utama dalam suatu masyarakat. Menurut Sudarsono *et al*, (2016) fungsi stratifikasi sosial dalam masyarakat adalah : memudahkan manusia dalam berhubungan, sebagai alat pemersatu dengan mengkoordinasikan, Alat masyarakat untuk menjalankan tugas pokok dan sebagai penyusun dan pengatur serta mengawasi hubungan-hubungan diantara anggota masyarakat.

## **1.7. Proses Sosial dan Interaksi Sosial**

Proses social adalah cara cara berhubungan yang dapat dilihat apabila para individu dan kelompok kelompok saling bertemu dan menentukan system serta bentuk hubungan tersebut atau disebut juga sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan.

Bentuk umum proses social adalah interaksi social. Interaksi social merupakan hubungan-hubungan social yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang perorang dengan kelompok manusia. Dalam hal yang sederhana, interaksi social terjadi apabila dua orang bertemu, mereka menyadari pihak lain menyebabkan perubahan dan menimbulkan kesan dalam pikiran seseorang yang kemudian menentukan tindakan apa yang akan dilakukannya. Berlangsungnya proses interaksi didasarkan pada faktor-faktor antara lain: Imitasi (peniruan), sugesti (pandangan atau dari seseorang yang dapat diterima orang lain), identifikasi (kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain) dan simpati (proses dimana seseorang tertarik pada pihak lain yang menimbulkan keinginan untuk memahami dan bekerjasama dengan orang lain).

Bentuk interaksi social terjadi karena proses-proses yang Asosiatif (kerjasama, akomodasi, asimilasi) dan proses-proses yang disasosiatif (persaingan, kontraversi dan pertentangan).

**a. Kerjasama (cooperation).** Kerjasama timbul apabila orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat yang bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut. Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kerjasama yang berguna. Bentuk kerjasama meliputi: Kerukunan (gotong royong dan tolong menolong), Bargaining (pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antar organisasi), Kooptasi (proses penerimaan unsur-unsur baru dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam organisasi untuk menghindari kegoncangan dalam organisasi), Koalisi (kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama ), Joint venture (kerjasama dalam perusahaan proyek-proyek tertentu).

**b. Akomodasi (accommodation)** yaitu suatu keadaan dimana ada keseimbangan dalam interaksi antara orang-perorangan atau kelompok-kelompok manusia dalam kaitannya dengan norma-norma social atau nilai-nilai social yang berlaku dalam masyarakat. Selain

itu, akomodasi dapat diartikan pula sebagai suatu proses yang menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan atau untuk mencapai kestabilan.

Bentuk-bentuk akomodasi yaitu: Coercion (akomodasi yang prosesnya dilaksanakan dengan paksaan), Compromise (akomodasi dimana pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian perselisihan yang ada), Arbitration (pertentangan diselesaikan oleh pihak ketiga yang dipilih oleh kedua pihak atau badan yang lebih tinggi dari mereka), Mediation (Menggunakan pihak ketiga yang netral untuk mengusahakan penyelesaian secara damai, tanpa ikut memberikan keputusan, hanya memberi nasehat untuk penyelesaian), Conciliation (usaha untuk mempertemukan keinginan - keinginan dari pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya tujuan bersama), Tolerati on (disebut juga tolerant –partic ipation yaitu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang formal bentuknya), Stalemate (akomodasi dimana pihak-pihak yang bertentangan karena mempunyai kekuatan yang seimbang, berhenti pada suatu titik tertentu dalam melakukan pertentangannya), Adjudication (penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan).

**c. Assimilation.** Asimilasi merupakan proses social dalam taraf lanjut, yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara individu atau kelompok dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama. Faktor yang mendukung asimilasi: toleransi, kesempatan bidang ekonomi yang seimbang, menghargai kebudayaan lain, terbuka, ada persamaan unsur kebudayaan, perkawinan campuran, adanya musuh bersama dari luar. Faktor yang menghalangi asimilasi: kehidupan yang terisolasi, tidak mempunyai pengetahuan budaya yang lain, perasaan takut pada budaya lain, ada perbedaan ciri fisik, in-group feeling yang kuat, perbedaan kepentingan, dan lain-lain.

**d. Persaingan (competition).** Persaingan merupakan suatu proses social, di mana individu atau kelompok yang bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian umum dengan cara menarik perhatian atau mempertajam prasangka yang telah ada, tanpa mempergunakan kekerasan atau ancaman. Bentuk-bentuk persaingan antara lain: persaingan ekonomi, persaingan kebudayaan, persaingan untuk mencapai suatu kedudukan dan peranan yang tertentu dalam masyarakat,

persaingan karena perbedaan ras. Fungsi-fungsi persaingan adalah: untuk menyalurkan keinginan-keinginan yang bersifat kompetitif, sebagai jalan dimana keinginan, kepentingan serta nilai-nilai yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian tersalurkan sebaik-baiknya, sebagai alat untuk mengadakan seleksi atas dasar seks dan seleksi social, sebagai alat untuk menyaring golongan-golongan karya untuk mengadakan pembagian kerja. Hasil suatu persaingan adalah: perubahan kepribadian seseorang, kemajuan, solidaritas kelompok, disorganisasi.

**e.Kontravensi (contravention).** Kontravensi pada hakekatnya merupakan suatu bentuk proses social yang berada antara persaingan dan pertentangan. Hal ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian, atau keragu-raguan terhadap kepribadian seseorang. Bentuk kontravensi: perbuatan penolakan, perlawanan dan lain-lain, menyangkal pernyataan orang lain di muka umum, melakukan penghasutan, berkhianat, mengejutkan lawan dan lain-lain.

Tipe kontravensi antara lain: kontravensi generasi-generasi dalam masyarakat akibat perubahan yang cepat, kontravensi seksual, kontravensi parlementer, kontravensi antar masyarakat setempat, antagonisme keagamaan, kontravensi intelektual, oposisi moral.

**f. Pertentangan/pertikaian (Conflict).** Pertentangan atau pertikaian adalah suatu proses social dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Sebab pertentangan: perbedaan individu-individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan dan perubahan social. Masyarakat biasanya mempunyai alat-alat tertentu untuk menyalurkan benih-benih permusuhan (safety-valve institutions), dengan menyediakan obyek-obyek tertentu yang dapat mengalihkan pihak-pihak yang bertikai kearah lain. Bentuk-bentuk pertikaian: pertentangan pribadi, pertentangan rasial, pertentangan antar kelas-kelas social umumnya karena perbedaan kepentingan, pertentangan politik, pertentangan yang bersifat internasional. Akibat dari bentuk-bentuk pertentangan: tambahnya solidaritas “in-group”, goyah atau retaknya persatuan kelompok, perubahan kepribadian, akomodasi atau dominasi atau takluknya salah satu pihak tertentu.

## **1.8. Perubahan Sosial**

Setiap manusia selama hidup pasti mengalami perubahan-perubahan. Perubahan dapat berupa pengaruhnya terbatas maupun luas, perubahan yang lambat dan ada perubahan yang berjalan dengan cepat. Perubahan dapat mengenai nilai dan norma sosial, pola-pola perilaku organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat merupakan gejala yang normal. Pengaruhnya bisa menjalar dengan cepat ke bagian-bagian dunia lain berkat adanya komunikasi modern. Perubahan dalam masyarakat telah ada sejak zaman dahulu. Namun, sekarang perubahan-perubahan berjalan dengan sangat cepat sehingga dapat membingungkan manusia yang menghadapinya

Perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilakunya diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Selo Soemardjan).

William F.Ogburn mengemukakan bahwa “ruang lingkup perubahan-perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial”. Kingsley Davis mengartikan “perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat”. MacIver mengatakan “perubahan-perubahan sosial merupakan sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial”. J.L.Gillin dan J.P.Gillin mengatakan “perubahan-perubahan sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat”. Samuel Koenig mengatakan bahwa “perubahan sosial menunjukkan pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia”.

Perubahan Sosial memiliki beberapa karakteristik yaitu:

- a. Pengaruh besar unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial.

- b. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat.
- c. Perubahan-perubahan dalam hubungan sosial (social relationships) atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan (equilibrium) hubungan sosial.
- d. Suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, idiologi maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat.
- e. Modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia
- f. Segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat.

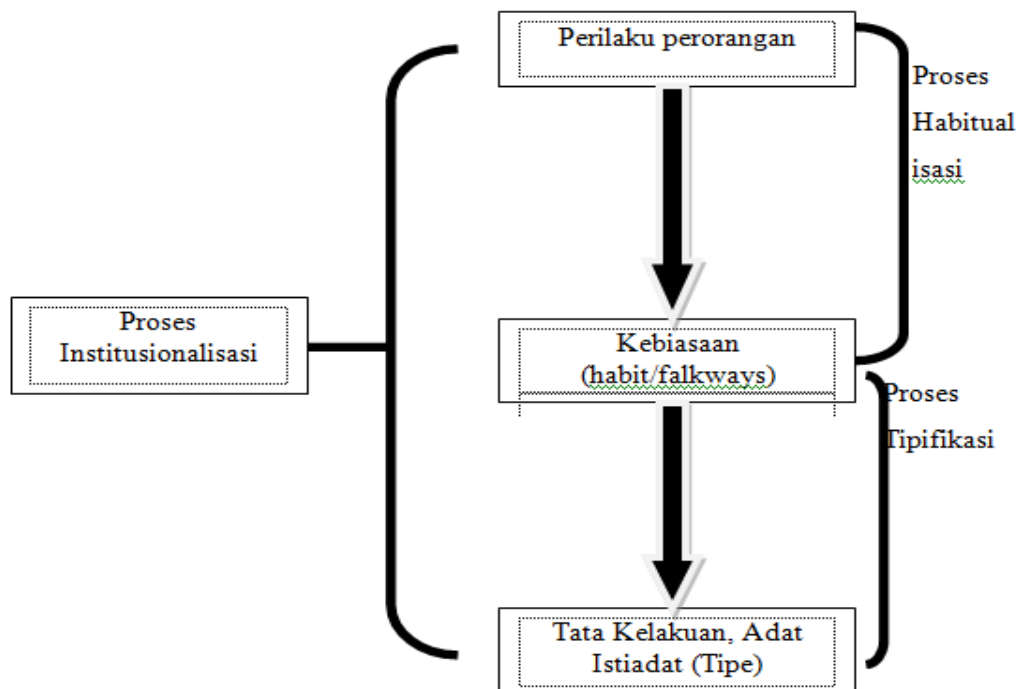
### **1.9. Kelembagaan Masyarakat**

Istilah kelembagaan diartikan sebagai lembaga kemasyarakatan yang abstrak dengan adanya norma-norma dan peraturan-peraturan tertentu yang menjadi ciri dari suatu lembaga kemasyarakatan (soekanto, 2002 dalam komarani, 2014). Proses pembentukan suatu kelembagaan masyarakat disebut dengan proses *institutionalization* yaitu proses suatu norma yang menjadi bagian dari salah satu lembaga kemasyarakatan yang dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari (Komarani, 2014). Sedangkan pengertian kelembagaan menurut Komarani, (2014) adalah suatu sistem yang dibuat oleh manusia untuk mengatur, aturan, cara, proses dan peran masing-masing komponen pendukung untuk mencapai tujuan tertentu.

Kelembagaan masyarakat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan lembaga masyarakat atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah, Desa dan lurah dalam memberdayakan masyarakat. Dimana proses kelembagaan tersebut dibentuk atas prakarsa masyarakat atau alas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah melalui musyawarah dan mufakat (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 2007 ayat 1).

Lembaga kemasyarakatan disebut juga sebagai institusia sosial. Menurut Koentjaraningrat dalam Aulianida (2014) lembaga kemasyarakatan (pranata sosial) adalah suatu sistem norma khusus yang menata rangkaian tindakan guna untuk memenuhi suatu keperluan dalam kehidupan masyarakat. Arti lain lembaga kemasyarakatan adalah suatu himpunan norma-norma dari segala tingkatan pada suatu kebutuhan untuk kehidupan masyarakat (Novirman, 2013).

Proses pembentukan suatu lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan proses *institutionalization* (Soekanto, 2002 dalam Komarani, 2014). Berikut adalah gambar terkait dengan proses institusionalisasi yang tersaji pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1. Proses institusionalisasi

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa proses institusionalisasimencangkup proses habitualisasi dan proses tipifikasi, dimana habitulasi adalah proses menjadikan suatu perilaku menjadi kebiasaan sedangkan tipifikasi merupakan proses penerimaan atau pembenaraan suatu kebiasaan oleh orang lain (Aulianida *et al*, 2014).

Lembaga kemasyarakatan mempunyai tiga fungsi dasar yatitu:

- Memberikan pedoman kepada anggota masyarakat
- Menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan.

- Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial.

#### **1.10. Sistem Nilai dan Aturan social**

Istilah sistem dari “sistem” yang merupakan bagian atau unsur yang berhubungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan bersama. Sedangkan istilah nilai merupakan sesuatu yang abstrak, yang dijadikan pedoman, serta prinsip-prinsip umum dalam bertindak dan bertingkah laku oleh orang atau kelompok.

Nilai berhubungan erat dengan masyarakat dalam menilai sesuatu. Definisi nilai adalah sebagai konsepsi, eksplisit atau implisit yang menjadi ciri khas seorang atau kelompok, mengenai hal-hal yang diinginkan yang memengaruhi pemilihan dari berbagai cara, alat, atau tujuan perbuatan yang tersedia. Berdasarkan sifatnya nilai di bagi menjadi empat yaitu:

- Nilai etika
- Nilai estetika
- Nilai agama dan
- Nilai sosial

Sistem nilai merupakan sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan masyarakat untuk bisa berinteraksi menurut pola-pola, sistem tata kelakuan, dan hubungan aktivitas untuk memenuhi kompleks hubungan khusus dalam kehidupan masyarakat (Anonim, 2009). Sedangkan dalam sistem ilmu sosiologi sistem nilai merupakan nilai inti (score value) dari masyarakat. Nilai inti yang dimaksud adalah nilai yang diikuti oleh setiap individu atau kelompok.

Aturan sosial di masyarakat perlu ditegakkan hubungannya dengan nilai, norma, dan pranata sosial. Cara penerapan aturan sosial dan pengendalian sosial dapat dilaksanakan dengan berbagai cara. Pada prinsipnya berkisar pada cara-cara tanpa kekerasan (persuasif) ataupun dengan paksaan (coersive). Cara mana yang sebaiknya diterapkan, tergantung pada siapa pengendalian sosial tersebut hendak diperlakukan dan dalam keadilan yang bagaimana akan dilaksanakan.

- Di dalam masyarakat yang tenteram, cara-cara persuasif atau tanpa kekerasan akan lebih efektif daripada penggunaan paksaan. Hal ini dikarenakan di dalam masyarakat yang tenteram sebagian besar dari kaidah-kaidah dan nilai-nilai telah melembaga. Namun demikian meskipun bagaimana tenteramnya suatu masyarakat pasti masih dijumpai warga-warga yang melakukan tindakan-tindakan menyimpang. Terhadap mereka yang melakukan penyimpangan diperlukan suatu paksaan, agar tidak terjadi goncangan-goncangan yang mengganggu ketenteraman yang telah ada.
- Dengan paksaan atau coercive sering diperlukan di dalam masyarakat yang sedang mengalami perubahan. Dalam keadaan seperti itu pengendalian sosial membentuk kaidah-kaidah baru untuk menggantikan kaidah-kaidah lama yang telah goyah. Cara-cara menggunakan kekerasan ada batas-batasnya, tidak selalu dapat diterapkan. Biasanya kekerasan menimbulkan reaksi negatif. Reaksi negatif tersebut selalu mencari kesempatan dan menunggu saat di mana agent of social control berada dalam keadaan lemah.
- Teknik compulsion dan pervasion. Dalam compulsion diciptakan situasi sedemikian rupa sehingga seseorang terpaksa taat atau mengubah sikapnya, yang menghasilkan kepatuhan secara tidak langsung, sedangkan pada pervasion norma atau nilai yang ada diulang-ulang penyampaiannya, dengan harapan bahwa hal tersebut masuk aspek bawah sadar seseorang. Dengan demikian maka orang tadi akan mengubah sikapnya sehingga serasi dengan hal-hal yang diulang-ulang penyampaiannya tersebut (Adityah, 2016).

### **Daftar Pustaka**

- Adityah E. 2016. Penerapan Pengetahuan Sosiologi Dan Aturan-Aturan Sosial Dalam Kehidupan Bermasyarakat. Catatan. <https://edwinadityah.wordpress.com/2016/12/19/penerapan-pengetahuan-sosiologi-dan-aturan-aturan-sosial-dalam-kehidupan-bermasyarakat/>.
- Anonim. 2009. Pengantar Sosiologi Kehutanan. Fakultas Kehutanan. Universitas Hasanudin. Makassar
- Aulianida D., Palupi E. N., Maharani I., & Anandita K. 2014. Kelembagaan Di Desa. Makalah. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas sebelas Maret. Surakarta

- Hani'ah J. 2016. Struktur Diferensi Dan Stratifikasi Sosial.
- Hanum F. 2011. Konsep, Materi Dan Pembelajaran Sosiologi. Seminar. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Harjono B. 2016. Bahan Ajar Sosiologi Suatu Pengantar. STT-INTI Bandung. Bandung
- Harjono B. \_\_\_\_\_. Sosiologi. STT-INTI Bandung. Bandung
- Komarani U. 2014. Kelembagaan Dan Kebijakan Pengelolaan Hutan Dalam Otonomi Daerah Di Kabupaten Tana Toraja. Bidang Peminatan Konservasi Sumber Daya Hutan. Fakultas Kehutanan. Universitas Nusa Bangsa
- Maunah S. 2015. Stratifikasi Sosial Dan Perjuangan Kelas Dalam Perspektif Sosial Pendidikan. Jurnal Bahan Ajar Vol.03 No. 01 Juni 2015. IAIN Tulungagung.
- Moeis S. 2008. Stuktur Sosial. Bahan Ajar. Jurusan Pendidikan Sejarah. Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung
- Novirma, Jepriadi, Isasri v. R., & Pratiwi W. 2013. Lembaga Kemasyarakatan. Makalah. Jurusan Geografi.Fakultas Ilmu Sosial.Universitas Negeri Padang. Sumatera Barat.
- Salamah U. 2011. Pengantar Sosiologi. Fakultas Sosial Dan Ilmu Politik. Unuversitas Pasundan. Bandung
- Septiawan R., Cantona E., & Boimau J. 2015. Ilmu Sosiologi. Makalah. Program Sudi Pancasila Dan Kewarganegaraan. Fakultas Keguruan Dan ilmu Pendidikan. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Simanjuntak D. H. P. 2016. Pengantar Sosiologi. Bahan Ajar. Fakultas Ilmu Sosioal. Universitas Negeri Medan. Medan
- Singgih D. S. 2007. Prosedur Analisis Stratifikasi Sosial Dalam Perspektif Sosiologi. Jurnal Volume 20 No.1-2007-01-01. Jurusan Ilmu Sosiologi. Universitas Airlangga
- Sudarsono A. & Wijayanti A.T. 2016. Pengantar Sosiologi. Fakultas Imu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta
- Tumengkol S. M. 2013. Sosiologi, Kegunaan Dan Masa Depan. Karya Ilmiah. Program Studi Sosiologi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sam Ratulangi. Manado.
- Wardana M. H. 2013. Wawasan Ilmu Sosial. Makalah. Program Studi S1 Pendidikan Geografi. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Malang. Malang